**PERTAMBANGAN BATU KAPUR OLEH I MADE SUKARAJA
DI KABUPATEN BADUNG, BALI
(Studi Kasus: Nomor 1105/Pid.Sus/2016PN.Dps)**

Natasha Elza Jauhara ¹⁾, Elsi Kartika Sari ²⁾

^{1,2)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Corresponding author: elsi.ks@trisakti.ac.id; natashaelza@gmail.com)

ABSTRAK

Seluruh bahan tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal (2) jo Pasal 8 UUPA menyatakan bahwa Negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur segala kekayaan atas sumber daya alam yang terkandung di dalam Indonesia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk melakukan suatu usaha pertambangan diperlukannya Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 4 Tahun 2004. Metode penelitian Normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika dedutif. Dalam perkara Nomor 1105/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Pertambangan Batu Kapur yang dilakukam I Made Sukaraja **tanpa memilik** Izin Usaha Pertambangan dapat dikatakan sebagai perbuatan Ilegal, dapat dikenakan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 jo Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018, namun Majelis Hakim memberikan sanksi Pidana selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Kata Kunci: Kata Kunci: Usaha Pertambangan, Hukum Pertambangan

I PENDAHULUAN

Di Indonesia peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan hukum yang mengatur mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara di Indoneisa dan menentukan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Hukum Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat orang banyak, karena itu

pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berkeadilan.

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.¹

Pertambangan merupakan salah satu atau sebagian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan permunian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang². Dengan kata lain, pertambangan merupakan suatu rangkaian dalam upaya pencarian penambangan/penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).³

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Supaya mendapatkan izin pertambangan, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis lingkungan dan finansial. Untuk melakukan usaha pertambangan diperlukan izin usaha pertambangan.

Pasal 1 Angka 9 UU No. 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara untuk memberikan sebuah Izin Usaha Pertambangan.

Salah satu jenis usaha pertambangan yang banyak di temukan di Indonesia adalah Pertambangan batu gamping atau biasa disebut dengan Batu Kapur. Batuan Kapur memiliki banyak kegunaan dalam bidang bangunan. Salah satu kegunaan dari batu kapur itu sendiri adalah sebagai bahan utama dari pembuatan semen oleh sebab itu sampai hari ini masih terdapat banyaknya pertambangan batu gamping atau biasa disebut batu kapur di beberapa tempat di Indonesia.⁴ Setiap orang yang ingin melakukan suatu pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) meskipun kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di atas tanah miliknya sendiri;

IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara: IUP terdiri atas dua tahap yakni:

1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

¹ *Ibid.*, h.9.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1.

³ Salim HS, *Op.Cit.*, h.24.

⁴ Pengertian Jenis dan Kegunaan Batu Gamping Batu Kapur, (On-Line), tersedia di: <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html>

2. IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Banyak orang yang melakukan pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Badung, Bali tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan, sehingga akan berdampak kerugian yang terdapat dalam pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. berdasarkan uraian diatas bagaimana Pertambangan Batu Kapur yang dilakukan oleh I Made Sukaraja di Kabupaten Badung, Bali berdasarkan Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2016 PN.Dps

II PEMBAHASAN

Pertambangan merupakan salah satu atau sebagian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang⁵. Dengan kata lain, pertambangan merupakan suatu rangkaian dalam upaya pencarian penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas),⁶ selain itu didalam undang-undang tersebut juga adanya pengelompokan dari pertambangan mineral yaitu jenis pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan yang terakhir pertambangan batuan.. Dengan adanya pengelompokan dari pertambangan mineral tersebut salah satu yang merupakan contoh dari pertambangan mineral tersebut adalah batuan gamping atau biasa disebut Batu Kapur. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Batu Gamping atau Batuan Kapur termasuk kedalam pertambangan mineral dengan jenis mineral bukan logam.

Untuk melakukan suatu usaha pertambangan diperlukannya Izin Usaha Pertambangan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 4 Tahun 2004, Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan tetapi selain IUP juga diperukannya Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan merupakan bagaian dari salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, perusahaan pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya.⁷ Pejabat yang berwenang memberikan kewenangan kepada badan/perorangan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota. Pemberian kewenangan tersebut dituangkan dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan.⁸

Oleh karena itu pengelolannya dilakukan pembagian wewenang dengan mengikuti tingkat kewenangannya yang terdapat di dalam Pasal 6 yang berisikan mengenai kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pasal 7 yang berisikan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, dan Pasal 8 yang berisikan mengenai kewenangan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1.

⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, h.24.

⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, h.63.

⁸ *Ibid.*

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wilayah Pertambangan menurut Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Diatas Wilayah Pertambangan yang telah ditentukan oleh pemerintah dapat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan/atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Pasal 1 Angka 9 UU No. 9 Tahun 2004 Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara untuk memberikan sebuah Izin Usaha Pertambangan.

Prinsip pemberian izin yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atay Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya IUP diberikan kepada:

1. Badan Usaha yang dapat berupa badan Usaha Swasta, Badan Usaha Miliki Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah
2. Koperasi
3. Perseorangan yang dapat berupa perorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan firman atau perusahaan komanditer

IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara:

IUP terdiri atas dua tahap yakni:

1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pasal 23 untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, dan syarat finansial. Pemegang Izin Usaha Pertambangan maka adanya hak yang dapat diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu terdapat didalam Pasal 90, 91, 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta selain memiliki hak, pemegang Izin Usaha Pertambangan memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila telah memiliki IUP, berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 IUP dapat

berakhir dikarenakan beberapa hal yaitu, dikembalikan, dicabut, dan habis masa berlakunya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan daerahnya tersendiri maka dari itu di setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan daerahnya tersendiri dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. salah satunya di daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 sebagai ketentuan dari pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dibidang pertambangan mineral di Provinsi Bali.

Dalam perkara yang dilakukan oleh I Made Sukaraja dalam kegiatan penambangan sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016 I Made Sukaraja tidak pernah mengajukan Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 yang ada di kabupaten Badung,

Pasal 1 angka 9 Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Izin Usaha Pertambangan Batuan adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan, serta Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali menyatakan Setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin pertambangan. Badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang bermaksud untuk menjual mineral bukan loam atau batuan yang tergali tetap harus memiliki izin pertambangan. Izin pertambangan diberikan oleh Gubernur dan diterbitkan oleh Instansi Perizinan. Izin pertambangan yang dimaksud berupa IUP atau IPR. IUP dan IPR diberikan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. oleh itu karena I Made Sukaraja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Daerah maupun Undang-Undang Pertambangan

I Made Sukaraja bukanlah perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan melainkan ia bermaksud untuk menjual batuan yang tergali di daerah Desa Pecatu Kabupaten Badung. Untuk melaksanakannya tersebut ia harus memenuhi ketentuan yang berada didalam Pasal 15 Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2018 yaitu I Made Sukaraja harus memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dikarenakan IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikpn kepada Badan Usaha atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual batuan yang tergali.

Setiap perorangan ataupun Badan Usaha tersebut hanya dapat diberikan satu jenis IUP Operasi Produksi untuk penjuakan terhadap satu jenis komoditas tambang. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perseorangan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018 ialah meliputi:

1. Surat permohonan
2. Fotocopy nomor pokok wajib pajak
3. Foto copy kepemilikan lahan
4. Surat persetujuan penyanding
5. Peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis
6. Peta atau gambar master plan kegiatan yang disetujui Instansi Teknis
7. Jumlah volume / tonase batuan yang akan tergali akibat kegiatan yang dilakukan

8. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup

Setelah itu dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi Gubernur melalui Instansi Perizinan memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi tersebut. Instansi yang dimaksud adalah BPMP provinsi Bali.

Dalam melakukan kegiatan Usaha pertambangan masih banyaknya orang-orang yang tidak melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Masih banyaknya ditemukan kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang dapat didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan tidak melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga putusan hakim menyatakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh I Made Sukaraja tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK, merupakan Tindakan Ilegal, dapat dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017, namun Majelis Hakim memberikan sanksi Pidana terhadap I Made Sukaraja selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap kegiatan I Made Sukaraja.

III KESIMPULAN

Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Badung Provinsi Bali dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut terdapat didalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018 sebagai melaksanakana pasal 6, Pasal 7 dan pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009. Dalam melakukan kegiatan pertambahan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan bukan logam atau batuan wajib memiliki Izin Pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP dapat dikenakan ketentuan pidana yang dapat didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah), namun Majelis Hakim mmberikan sanksi Pidana terhadap I Made Sukaraja selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap kegiatan I Made Sukaraja.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

H. Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Republik Indonesia, Undang-Undang dasar 1945

Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Rebublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Republik Indoneisa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Wilayah Pertambangan

Republik Indonesia, Peraturan daerah Prpvinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan